

**SKRIPSI**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PRSPEKTIF HUKUM**  
**ISLAM.**

( Analisis putusan PN No.172/Pid.B/PN/Ska/2005, dan No.  
291/Pid.B/PN/Ska/2008. Menurut Prsepektif Hukum Islam)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum dan  
Derajat Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**CHAIRUL UMAM**

**NIM: C 100 030 289/I000 030 016**

**TWINING PROGRAM**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM DAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2010**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Bila ditelusuri ke belakang, kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan barang kali sudah satu relasi diantara mereka sendiri. Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari ideologi tertentu, yang mengesahkan penindasan, baik perorangan maupun kelompok terhadap pihak yang lain. Bisa jadi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam atau laki-laki atas perempuan, dimana pihak tertindas di sudutkan pada posisi yang membuat mereka dalam ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik. Menegaskan bahwa penindasan juga di sebabkan oleh pandangan subordinatif yang didukung oleh dinamika sosial politik yang berakar pada tatanan yang hirorkir, submissif dan mengesahkan kekerasan sebagai mekanisme kontrol. Disahkan sebagai setandar kenormalan masyarakat

---

<sup>1</sup> UU RI. No. 23 tahun 2004. pasal 1 ayat 1. ( Jakarta Kemanterian Pemberdayaan Perempuan RI 2004 ) hal. 1.

maka ideologi patriarki berperan untuk menetapkan bahwa kekuasaan relasi gender berada di tangan laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak<sup>2</sup>.

Tindak kekerasan biasa terjadi baik di sektor domestik dan publik. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau lebih dikenal dengan KDRT, jauh lebih rumit dibahas dibanding kekerasan sektor publik karenanya kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius, namun kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang tertutup ketat, karena persoalan terjadi didalam rumah tangga. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga sering di anggap wajar karena diyakini memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami, sebagai pemimpin rumah tangga. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.<sup>3</sup>

Sebagai contoh kecil saja kekerasan yang terjadi, kasus Manohara, Cici paramida, Maia, dan artis lain yang pernah mengalami KDRT tetaplah sebuah kasus yang harus di proses secara hukum yang berlaku. Ancaman KDRT tidak main-main, yakni hukumannya maksimal lima tahun penjara. Yang menjadi ironi ialah ketika media seakan hanya bersuara lantang ketika kasusnya

---

119 <sup>2</sup> R. Dzuhyati S., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta pustaka Pelajar. 2002 hlm. 118-

<sup>3</sup> Hasyiem Syafiq. *Menukar Harga Perempuan*, Bandung Mizan. 1998, hlm. 189

menimpa seorang artis atau selebritis. Bagaimana kalau itu menimpa orang-orang biasa<sup>4</sup>?

Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan kesah isteri atau anggota keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Akibat mereka memendam persoalannya sendiri dan semakin yakin dengan anggapannya yang keliru bahwa suami berhak mengontrol isteri atau keluarganya. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat tindak kekerasan menunjukkan peningkatan baik volume maupun kualitasnya dari waktu ke waktu.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau (KDRT) di beberapa kabupaten di Jawa Tengah diantaranya: Kabupaten Bantul terus meningkat. Hal itu mengindikasikan semakin beraninya masyarakat untuk melaporkan kasus (KDRT) yang selama ini dianggap masih tabu. Sebagian besar kasus KDRT dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Berdasarkan data Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) Kabupaten Bantul, jumlah kasus KDRT selama tahun 2008 tercatat 27 kasus, sementara tahun 2007 baru 17 kasus. Kasus tersebut berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, perkosaan, pencabulan, dan penelantaran.<sup>5</sup> Dan di Kabupaten Wonosobo Sejak tahun 2006 hingga Juli 2008 terdapat 75 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 20 kasus Perkosaan dan pelecehan seksual. Disamping itu tercatat satu kasus Kekerasan dalam pacaran,

---

<sup>4</sup> Gema Rakyat. 21 juni 2009 hlm. 2

<sup>5</sup> <http://www.kasus.KDRT.di.bantul.meningkat.htm>

3 kasus trafiking perempuan, 3 kasus pencabulan dan 6 kasus kekerasan terhadap anak.<sup>6</sup> Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kabupaten Kendal selama tahun 2009 tercatat 161 kasus kekerasan. Dari jumlah itu, 50 persen di antaranya belum tertangani, kata Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PPT-PKPA) kasus KDRT di Kendal cenderung meningkat, karena pada tahun 2008 hanya ada 102 kasus. Itupun tindak kekerasannya bermacam-macam, mulai dari pemerkosaan hingga pemukulan.<sup>7</sup>

Kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, dan lingkungannya. Tindak kekerasan merupakan manifestasi dari jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Kegoncangan hati dan jiwa itu sangat begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu, individu benar-benar dipengaruhi oleh nafsu dan hanya memikirkan pemikiran pada dirinya sendiri. Ia tidak memikirkan keselamatan atau kesejahteraan orang lain. Keadilan baginya kemudian hanya mendapat apa yang diinginkan, walaupun itu berarti kekacauan atau disteruksi bagi pemilihan atau kehidupan. Berbuat bijak penuh pertimbangan dan sabar merupakan perilaku yang jauh darinya pada saat itu. Nilai-nilai sosial, moral dan keagamaan yang menjadi pegangan ketika berada dalam keadaan setabil tidak

---

<sup>6</sup> <http://www.Pemerintah Kabupaten Wonosobo.htm>

<sup>7</sup> <http://www/170293-sebanyak-161-kasus-KDRT-muncul-di-Kendal.html>

lagi menjadi bahan pertimbangan. Dengan demikian orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang kehilangan kontrol dan tidak dapat menyeimbangkan pikiran, hasrat dan perasaan terhadap orang lain. Ketidakmampuannya yang mengatur tekanan pada dirinya sehingga membuatnya merusak apa yang ada disekelilingnya.<sup>8</sup>

Kekerasan bukan hanya oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga diantara perempuan itu sendiri sering terjadi kekerasan, baik dalam rumah tangganya sendiri maupun dirumah tangga orang lain. Penderitaan yang dialami oleh pembantu rumah tangga oleh majikan perempuan adalah salah satu dari sekian contoh yang ada dalam masyarakat dewasa ini. Untuk mengeliminasi tindak kekerasan didalam rumah tangga, tidak dapat dilihat hanya dari satu dimensi saja. Tetapi secara komperhensif dan multi dimensi.

Dengan memahami apa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga itu, maka bisa saja kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi terhadap Suami yang dilakukan oleh Isteri. dengan demikian, apabila seorang istri melakukan kekerasan terhadap suami dan menimbulkan akibat sebagai dirumuskan UU No.23 tahun 2004, maka istri akan terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2004.<sup>9</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga biasa terjadi baik secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Upaya penyadaran anggota rumah

---

<sup>8</sup> Sunan Kalijaga. *Pusat Studi Wanita*. 2001. hlm. 133-134

<sup>9</sup> [http:// www.Com. Konsultasi](http://www.Com.Konsultasi). Kamis 13 November 2008 - 20:13:32

tangga agar menghindari diri dari kekerasan terhadap anggota rumah tagganya sendiri, berbeda dengan upaya menyadarkan pengedar narkoba misalnya atau tindak kriminal lainnya. Oleh karena itu perlu adanya legitimasi hukum berkaitan dengan eliminasi terhadap tindak kekeraan yang terjadi dalam rumah tangga.

Rumah tangga sebagai institusi sakral yang dibangun melalui sebuah proses dan prosesi yang lebih berbobot agamis, sejak dari akad nikah, upacara perkawinan, proses kehamilan sampai proses kelahiran anak seterusnya, keseluruhan prosesnya serta dengan nuansa ilmiah. Oleh karena itu mungkin terjadi dalam rumah tangga itu harus diselesaikan dengan nuansa yang sama.

Persoalan sekarang adalah seberapa jauh seseorang mentaati ajaran agamanya sehingga dia bisa menghindarkan diri dari berbuat kekerasan terhadap anggota keluarganya. Didalam penjelasan konsideran UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) menyatakan bahwa ”setiap orang dalam ruang lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, harus didasari oleh agama, hal ini perlu terus dikembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga”. Dari sini jelas sekali kesadaran penyusunan UU ini bahwa upaya mengeliminasi kekerasan dalam rumah tangga secara preventif adalah melaului pengalaman ajaran agama. Tak ada orangpun menolak bahwa agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia dalam rangka menegakan kemasalahatan, kasih sayang

dan keadilan, menyeluruh. Hal ini dengan jelas dituliskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiak 107 yang menyatakan :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al-Anbiak:107).

Pernyataan lain tentang ini juga dinyatakan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori, Imam Malliki, dan Ahmad:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: ”Sesungguhnya aku (Muhammad) benar-benar ditugaskan untuk menyempurnakan ahlak (Moral)” (HR Buhori Muslim, Imam Maliki, dan Ahmad).

Teks-teks keagamaan merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan umum, manusia dimanapun dan kapanpun. Dalam ajaran Islam keharusan menegakan kemasalahatan dan menolak kerusakan didasarkan atas hukum-hukum Tuhan. Al-Qur'an menyatakan dengan jelas bahwa hukum hanyalah wewenang Allah. Dialah Allah yang menyatakan kebenaran (Al-Hak) dan dialah sebaik-baik yang memutuskan.<sup>10</sup>

Seperti yang di jelaskan dalam surat Al-An'am, 57 menyatakan:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ  
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

---

<sup>10</sup> Forum kajian kitab kuning. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Jakarta 2002. hlm. 108



Artinya: *"Katakanlah: "Sesungguhnya Aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik". ( Al-An'am: 57 )*

Hukum-hukum yang dibuat manusia hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum tuhan tersebut. Arti lain dari ini adalah bahwa kekerasan menurut pandangan hukum Islam, disamping harus dihindari, hanya dinyatakan absah untuk dilakukan apabila dimaksudkan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan dan sesuai dengan hukum Tuhan secara indera dan rasional mengandung ide-ide normatif diatas.

Dari hasil penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Surakarta, mengenai KDRT dengan pokok putusan Nomor. 172/Pid.B/2005/PN. Ska pada pokoknya pengadilan Negeri Surakarta memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana di atur dalam pasal 44(1) UU No. 23 tahun 2004 dalam surat dakwaan No. 73/SKRTA/Ep.2/05/2005 tanggal 23 Mei 2005.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah, terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL
4. Menetapkan supaya terpidana di bebani biaya perkara sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah).

Dan putusan Nomor. 291/Pid.B/2008/PN Ska. Dapat kita lihat juga Bahwa ia terdakwa Pinggir Topo Hartopo pada hari jum'at tanggal 07 juni 2008 sekitar jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masi dalam bulan juni tahun 2008 brtempat di rumahnya di Jl. Dempo Dalm II Rt 01/Rt 013 Kel. Mojosongo , kec. Jeberes kodia Surakarta atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Negeri Surakarta, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumayh tangga terhadap isterinya Sri Sarianti yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ia sudah merasa ada ketidak jujuran dari isterinya. Korban Sri Sariwati dengan di temukannya sebuah Hp. Yang berisikan SMS dari seorang laki-laki yang tidak di kenal Terdakwa dimana di saat dia menanyakan masalah tersebut kepada korban/ Isterinya menyatakan itu hanya teman biasa saja.

Bahwa Terdakwa tidak puas dengan jawaban si korboan, dengan penuh rasa emosi ia memukul si korban denggan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian muka, mata kiri dan kepala bagian belakang juga menendang dengan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali pada bagian perut, menginjak-injak punggung korban dan bahkan ia merasa tidak puas, dengan menggunakan kayu ia memukul kaki korban sebanyak dua kali pada bagian kaki kiri, yang mengakibatkan mata kirinya bengkak, kaki kirinya sulit untuk di gerakan demilkian pula dengan lengannya. Hal mana yang di kuatkan oleh Visum et Repetum dari poliklinik Polwil Surakarta No. R/VER-142/VI2008/poliklinik

tertanggal 08 juni 2008 yang di buat oleh dr. Nariyana dengan hasil kesimpulan mennyatakan pada diri korban di temukan luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah, punggung kanan, lengan bawah kiri dan kanan, luka lecet pada bibir atasbagian kiri, tengkuk punggung kiri, pergelangan tangan kanan, punggung telapak kaki kiri dan kanan, juga luka pada bola mata kiri, yang di duga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana berdasarkan pasalk 44 (1) UU KDRT No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Dengan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,diharapkan memberikan kekuatan dan payung bagi penyelamatan kaum perempuan, laki-laki dan anggota rumah tangga terhadap kekerasan yang terjadi.

Dengan gambaran latar belakang demikian itu, diharapkan telah terlihat arti penting penelitian ini. Berdasarkan latar belakang demikian itu, maka penulis merumuskan judul skripsi ini, yakni: **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PRSEPEKTIF HUKUM ISLAM.** (Analisis Putusn Pengadilan Negeri Surakarta No.172/Pid.B/PN/Ska/2005 dan putusan No.291/Pid.B/PN/Ska/2008).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Latar Belakang Disahkannya UU No. 23 tahun 2004

Tentang Penghapusan KDRT?

2. Bagaiman pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim No.172/Pid.B/PN.Ska/2005 dan No. 291/Pid.B/PN.Ska/2008. tentang Kekerasan?

### **C. PEMBATASAN MASALAH**

Adapun dalam penelitian ini, perlu dilakukan pembatasan masalah agar memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan. Oleh sebab itu, maka penelitian ini dibatasi dengan membahas perkara KDRT yang telah di putus oleh PN surakarta dalam putusan No. 172/Pid.B/2005 dan No. 291/Pid.B/2008. Menurut persepektif hukum pidana Islam.

### **D. TUJUAN DAN MAMFAAT PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui asas-asas dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.
- 2 Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Putusan hakim No.172/Pid.B/PN/Ska/2005 dan No. 291/Pid.B/PN/Ska/2008. tentang KDRT.

Selanjutnya penulis mengharapkan bahwa penyusunan ini mempunyai banyak kegunaan antara lain:

1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam bidanng keilmuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar *survive*. Disamping itu terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir materialisme dan sifat egois, sehingga kekerasan menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga) pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh laki-laki, baik suami terhadap isteri, maupun ayah terhadap anak-anaknya.<sup>11</sup>

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2 ayat (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau.

---

<sup>11</sup> LA Jamaa S.Ag MHI dan Dra. HJ. Hadijah, MA. *Hukum islam dan Undang-undang anti kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Binailmu Surabaya. 2008, hal.1

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga.

Menurut UU No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Pasal 5 ) yang dimaksud kekerasan dalam lingkup Rumah Tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Jadi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memasuki kekerasan sosial sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat di pahami, bahwa kekerasan sosial dapat mengambil salah satu bentuk dari empat kekerasan tersebut.<sup>12</sup>

Apapun bentuk dan motifnya kekerasan adalah tindak pidana dan tidak dibenarkan dari agama manapun. Allah berfirman dalam surat Al-an'am ayat 29-30:

---

<sup>12</sup> Ibit, hlm. 70

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿١٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقُفُّوا  
 عَلَىٰ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا  
 كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya. Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): "Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia Ini saja, dan kita sekali-sekali tidak akan dibangkitkan" Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya (tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan). berfirman Allah: "Bukankah (kebangkitan Ini benar?" mereka menjawab: "Sungguh benar, demi Tuhan kami". berfirman Allah: "Karena itu rasakanlah azab ini, disebabkan kamu mengingkari(nya)".

Semangat anti kekerasan dilihat sejak dari keluarga sebagai mana Sabda

Nabi “yang terbaik diantara kamu adalah orang yang terbaik bagi keluarganya

“ Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ؕ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكَرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ  
 فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

## F. METODE PENELITIAN

Menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan.<sup>13</sup> Dengan demikian, metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam suatu

<sup>13</sup> Prof . Dr Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI press. 1986. hlm. 10

penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (*normative*) yakni dalam penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistimatis tentang fakta yang berhubungan dengan KDRT. Dan di tinjau dari prsepektip hukum pidana Islam.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul yang di ajukan, maka penelitian ini dilakukan di lingkungan hukum PN Surakarta karena merupakan salah satu lokasi terjadinya KDRT, yang di putus PN Surakart.

#### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat analisis, kasus yang menguraikan tentang putusan-putusan Hakim mengenai tindak kekerasan yang terjadi dalm Rumah Tangga dengan menganalisisnya menurut prsepektif hukum pidana Islam.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu, data-data yang di peroleh dari buku-buku ilmiah, kitab Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad, Bulletin, Jurnal, laporan penelitian dan lain-lain yang mendukung. Untuk mendukung data-data sekunder di butuhkan juga data Primer yang berupa putusan PN Surakarta



No.172/Pid.B/2005. No. 291/Pid.B/2008. Yang terkait secara langsung dengan data sekunder.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan penelusuran dan mengkaji berbagai buku yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan analisis data dengan cara deduktif dan induktif. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum yang menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduktif ini dilakukan dengan cara menjelaskan secara definitif tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2004, dan pandangan hukum islam tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Sedangkan metode induktif yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari hal-hal yang khusus yang kemudian ditarik kesimpulan umum atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut. Hal khusus yang dimaksud adalah definisi-definisi tentang kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hukum Islam. Metode induktif yang digunakan skripsi ini yaitu induksi enumeratif yang merupakan generalisasi yang di dasarkan pada sampel-sampel tertentu dan hasilnya tergantung sampel-sampel tersebut yang mewakili dari populasi

dimana dalam hal ini sampel yang digunakan adalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama beberapa tahun terakhir (2008-2009) yang mewakili dari seluruh data-data yang terhimpun. Dan induksi analisis yang merupakan prosudur dimana dilakukannya analisis terhadap semua kasus-kasus mengenai ciri-ciri yang khas dalam menentukan kondisi-kondisi yang selalu timbul mendahului terjadinya suatu kejadian tertentu. Dimana dalam analisis ini diambil dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan ciri khas pada masing-masing bentuk tindak kekerasan yang terjadi.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab. Bab pertama, memuat pendahuluan, latarbelakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistimatika penulisan skripsi.

Bab kedua, memuat uraian tentang tinjauan pustaka, dasar keberadaan filosofis UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dasar keberadaan Sosiologis dari UU NO. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dasar Keberadaan Normatif UU No. 23 tahun 2004 tentang pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Menurut Hukum Islam, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Islam.

Bab ketiga, hasil penelitian dan pembahasan, putusan Pengadilan Negeri Surakarta, kasus kekerasan dalam rumah tangga di solo dan pandangan hukum

Islam terhadap putusan PN Ska No.172/Pid.B/PN/Ska/2005, dan No.291/Pid.B/PN/Ska/2008, terhadap kekerasan.

Bab keempat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.